

PENGEMBANGAN PROGRAM KECAKAPAN HIDUP (*LIFE SKILLS*) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR PESANTREN

The Improvement of Life Skills Program for Community Empowerment of Surrounding Islamic Boarding School

Oleh : Pudji Muljono dan Dian Noor Tamzis Hanafi

Abstract

As the effect of economic crisis in 1998 and facing global economic crisis situation since 2008, Indonesia has to overcome various social problems such as unemployment, the increasing number of drop-out students, and the increasing rate of the poverty. This phenomenon drives the Department of National Education (DNE) to establish the Life Skills Program involving the society. But, there are different concepts and implementation about this program between World Health Organization (WHO) and DNE. The government policy give opportunity for the society to actively engage in education sector is responded by the community of Village of Sukosono, District of Kedung, Regency of Jepara by establishing Community Learning Center (CLC) "Al-Wathoniyah". This establishment is driven by the relatively low level of welfare and education in Sukosono community. CLC carries out the extramural education including Life Skills Program and cooperates with Islamic Boarding School "Mambaul Qur'an". The implementation of this program needs to be evaluated and given feedback through research and action program, by means of observation, interview, documentation study, and Focus Group Discussion (FGD) in order for the program to be implemented better in the future.

Keywords: welfare, extramural education, life skills program, Islamic Boarding School.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia 1998 mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan sosial, misalnya pengangguran, banyaknya anak putus sekolah, serta meningkatnya kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,2 juta jiwa. Pada saat Indonesia belum sepenuhnya keluar dari dampak krisis ekonomi 1998, kini kembali dihadapkan pada krisis keuangan global sejak 2008 yang mengancam bertambahnya pengangguran dan kemiskinan di Indonesia akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya permintaan ekspor dunia.

Untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan tersebut, diperlukan upaya-upaya peningkatan pendidikan dalam rangka penguasaan iptek dan keterampilan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Pendidikan dipandang sebagai modal penting untuk memutuskan rantai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang. Pentingnya pendidikan menyebabkan *United Nations Development Programme* (Depdagri 1997) menetapkan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu alat untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah.

Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia, menetapkan berbagai kebijakan dan upaya pengembangan pendidikan melalui pendekatan “*broad based education*” atau pendidikan berbasis pada kebutuhan masyarakat luas. Kebijakan dan upaya ini turut melibatkan partisipasi masyarakat, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah (PLS), termasuk program *life skills*. Bentuk keterlibatan partisipasi masyarakat adalah pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara telah didirikan PKBM Al-Wathoniyah yang menyelenggarakan berbagai jenis PLS. Pendirian PKBM ini selain karena kebijakan Depdiknas, juga didorong oleh tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Sukosono yang cenderung rendah (74,05% berpendidikan SD dan tidak tamat SD; 69,40% berada pada tingkat prasejahtera dan sejahtera I).

Sebagian besar penduduk Sukosono bergerak dalam sektor permeubelan yang sebagian besar berorientasi ekspor. Tetapi kondisi sektor permeubelan saat ini mengalami pasang-surut, mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat statis cenderung menurun. Untuk memberikan alternatif jenis pekerjaan kepada masyarakat Sukosono agar tidak hanya bergantung pada sektor meubel, maka PKBM Al-Wathoniyah berupaya memberikan keterampilan praktis lain kepada masyarakat melalui program *life skills*. Program *life skills* - atau tepatnya *vocational skills* - yang dilaksanakan adalah seni ukir/meubel, bobok, jahit-menjahit dan bordir, pembuatan makanan ringan (rengginan), pembuatan roti bolu, serta sablon.

Di Sukosono, program *life skills* diselenggarakan atas kerja sama PKBM Al-Wathoniyah dengan pesantren *salafi* Mamba’ul Qur’an, dengan didampingi oleh dinas teknis terkait. Pesantren yang menitikberatkan pada pengkajian Al-Qur’an, kitab-kitab kuning, dan hapalan Al-Qur’an ini, “membuka diri” pada masuknya pendidikan umum bagi para santri melalui berbagai jenis PLS, termasuk *life skills*. Keterlibatan pesantren dalam bentuk: membantu sosialisasi program PLS kepada masyarakat Sukosono, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk tempat, mendorong para santri untuk mengikuti program-program PLS, serta kyai pesantren yang menjadi tutor PLS. Tetapi tidak semua jenis ketrampilan yang diberikan melalui *life skills* dapat berjalan baik, sebagian berkembang sebagian berhenti di tengah jalan. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi, penelitian, dan program aksi agar *life skills* dapat lebih memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang sesuai dengan kondisi di lapangan adalah:

1. Bagaimana profil program *life skills* yang diselenggarakan PKBM Al-Wathoniyah di Desa Sukosono?
2. Bagaimana efektifitas program *life skills* tersebut dilaksanakan?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dalam penyelenggaraan program *life skills* tersebut?
4. Bagaimana merancang program *life skills* di PKBM untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren?

Tujuan Kajian

Tujuan kajian secara umum adalah untuk mengkaji penyelenggaraan program *life skills* melalui PKBM untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren. Sedangkan secara khusus tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan profil program *life skills* yang diselenggarakan PKBM Al-Wathoniyah di Desa Sukosono;
2. Menganalisis efektifitas program *life skills* dilaksanakan;
3. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dalam penyelenggaraan program *life skills* tersebut;
4. Merancang program *life skills* di PKBM untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Luar Sekolah

Dunia pendidikan mengenal konsep *life long education* atau pendidikan sepanjang hayat (PSH) yaitu tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstrukturan ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai paling tua (Cropley, diacu oleh Tirtarahardja & La Sulo 2005). Proses pendidikan tidak terbatas hanya berlangsung dalam lembaga pendidikan, melainkan sesuai dengan prinsip PSH, terjadi di mana pun, misalnya dalam keluarga, di tengah masyarakat, dan bahkan dalam lingkungan kerja. Misi pendidikan yang diemban oleh kelembagaan-kelembagaan tersebut sama pentingnya dengan proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah atau institusi pendidikan lainnya.

Terdapat tiga bentuk penyelenggaraan pendidikan sesuai asas PSH tersebut, yaitu bentuk formal, non formal, dan informal (Wahyudin *et al* 2008; Joesoef 2004; UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Bentuk formal biasa kita kenal sebagai pendidikan yang berstruktur dan berprogram, sedangkan bentuk non formal biasanya singkat waktunya dan tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk pengetahuan atau keterampilan tertentu yang langsung dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Bentuk pendidikan informal tidak mengenal jangka waktu tertentu serta tidak berstruktur, dan terjadi seumur hidup karena melibatkan proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat. Ketiga jenis pendidikan dimaksud digabung menjadi dua bagian, yaitu pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan pendidikan luar sekolah (PLS) yang mencakup pendidikan informal dan non formal.

Life Skills

Broling (<http://www.google.com/lifeskills>) menjelaskan bahwa, “*Life skills constitute a continuum of knowledge and attitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid interruptions of employment experience*”. Dengan demikian *life skills* dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (*vocational job*), namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti: membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja, menggunakan teknologi. Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya.

UNICEF mengungkapkan bahwa *life skills* sebagai “*a behaviour change or behaviour development approach designed to address a balance of three areas: knowledge, attitude and skills*”. *The UNICEF definition is based on research evidence that suggests that shifts in risk behaviour are unlikely if knowledge, attitudinal and skills based competency are not addressed*. *Life skills* adalah suatu perubahan perilaku atau pendekatan pembangunan perilaku yang dialamatkan untuk menyeimbangkan tiga area: pengetahuan, perilaku, dan keterampilan. Berdasarkan penelitian, apabila ketiga area ini tidak seimbang maka tujuan perubahan perilaku tidak terwujud dengan baik.

WHO mendefinisikan *life skills* sebagai, “*the abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life*”. *Life skills* adalah kemampuan untuk beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang menghadapi tantangan dan persaingan dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. WHO mengelompokkan *life skills* ke dalam lima kelompok, yaitu: kecakapan mengenal diri (*self awareness*) atau kecakapan pribadi (*personal skill*), kecakapan sosial (*social skill*), kecakapan berpikir (*thinking skill*), kecakapan akademik (*academic skill*), dan kecakapan kejuruan (*vocational skill*).

Esensi *life skills* adalah kemampuan yang membantu meningkatkan mental dan berguna bagi para remaja/pemuda untuk menghadapi realita kehidupan. Sebagian besar profesional pengembangan masyarakat sepakat bahwa secara umum *life skills* diaplikasikan dalam konteks sosial dan kesehatan. *Life skills* bermanfaat dalam area: pencegahan penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, kehamilan di luar nikah, pencegahan HIV/AIDS, dan pencegahan bunuh diri. Secara singkat, *life skills* memberdayakan para remaja/pemuda bertindak positif untuk melindungi diri sendiri dan meningkatkan perilaku hidup sehat dan hubungan sosial yang positif.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *life skills* dititikberatkan kepada usaha-usaha perubahan perilaku, yang diawali dengan perubahan pola pikir positif bagi para remaja/pemuda untuk dapat menghadapi persoalan hidup sehari-hari.

Berbeda dengan tersebut di atas, konsep *life skills* menurut Depdiknas dijabarkan melalui program yang dititikberatkan pada kemampuan untuk menguasai keterampilan praktis (*vocational skill*). Penulis melakukan analisis terhadap konsep *life skills* Depdiknas (Depdiknas 2004) sebagai berikut:

- a. Program *life skills* ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, sehingga dimungkinkan terjadi tumpang-tindih dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Departemen Sosial yang lebih berkompeten menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang memerlukan sinergi antara berbagai komponen bangsa, termasuk departemen-departemen pemerintah, tetapi jika saling tumpang-tindih hanya akan menyelesaikan masalah secara parsial.
- b. Depdiknas mendasarkan konsep *life skills* pada konsep WHO yang meliputi lima jenis *skills*: *personal skill*, *thinking skill*, *social skill*, *academic skill*, dan *vocational skill*; tetapi titik beratnya hanya pada *vocational skill* saja. Hal ini menjadikan *life skills* terbatas dalam pengertian dan pelaksanaannya. Padahal esensi dari *life skills* adalah perubahan perilaku yang diawali dengan perubahan pola pikir, agar masyarakat dapat cakap dalam mengatasi berbagai persoalan hidup, bukan hanya pada persoalan ekonomi semata.
- c. Konsep *life skills* dipahami oleh masyarakat dan Dinas P dan K sebagai padanan dari kata keterampilan, atau keterampilan kerja. Orang yang punya *life skills* bisa

dimaknakan sebagai orang yang terampil atau orang yang siap kerja, siap masuk dunia kerja. Dengan kata lain, *life skills* diartikan sebagai *skill* yang ujung-ujungnya adalah keterampilan yang bisa menghasilkan pendapatan (*income earning*). Pemahaman ini bisa jadi karena sosialisasi program yang dilaksanakan Depdiknas beserta jajarannya membatasi pengertian *life skills* yang seharusnya lebih luas.

- d. Program *life skills* dapat identik dengan pengertian “proyek” sebagaimana sering diartikan pada masa orde baru, yang menitikberatkan pada *top-down approach*. Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat hanya sebatas sebagai “pelaksana” program yang telah digariskan pemerintah, atau berada pada kategori *partisipasi fungsional*, di mana masyarakat menjalankan kegiatan setelah pemerintah memutuskan dan menerbitkan petunjuk pelaksanaannya. Di beberapa tempat, pola pendekatan semacam ini akan dapat mematikan kreatifitas, prakarsa, dan inisiatif masyarakat.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

PKBM didefinisikan sebagai suatu wadah berbagai pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya; yang pengelolaannya berdasarkan prinsip DOUM (Direktori PKBM Jawa Barat 2006 dalam Yulianto 2008). Dari konsepsi tersebut, terlihat penekanan pada aspek partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembelajaran/pendidikan. Istilah PKBM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berarti “buatan” pemerintah pusat. Tetapi, dalam proses pembentukannya, PKBM menggunakan prinsip pengembangan masyarakat yang menekankan kepada partisipasi dan inisiatif masyarakat sendiri. Sejalan dengan Ife (1995) yang mengatakan bahwa *community development* sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas, maka penyelenggaraan pendidikan non formal melalui PKBM dapat diartikan sebagai *community development*.

PKBM merupakan basis penyelenggaraan PLS yang berlokasi di tengah masyarakat; yang pengelolaannya berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM). Artinya bahwa prakarsa penyelenggaraan pembelajaran diharapkan dapat tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan kebutuhan masyarakat sendiri, sehingga masyarakat setempat akan lebih mempunyai rasa memiliki yang selanjutnya kegiatan belajar tersebut dapat berkembang, berkelanjutan (*continuiting learning*) dan optimal.

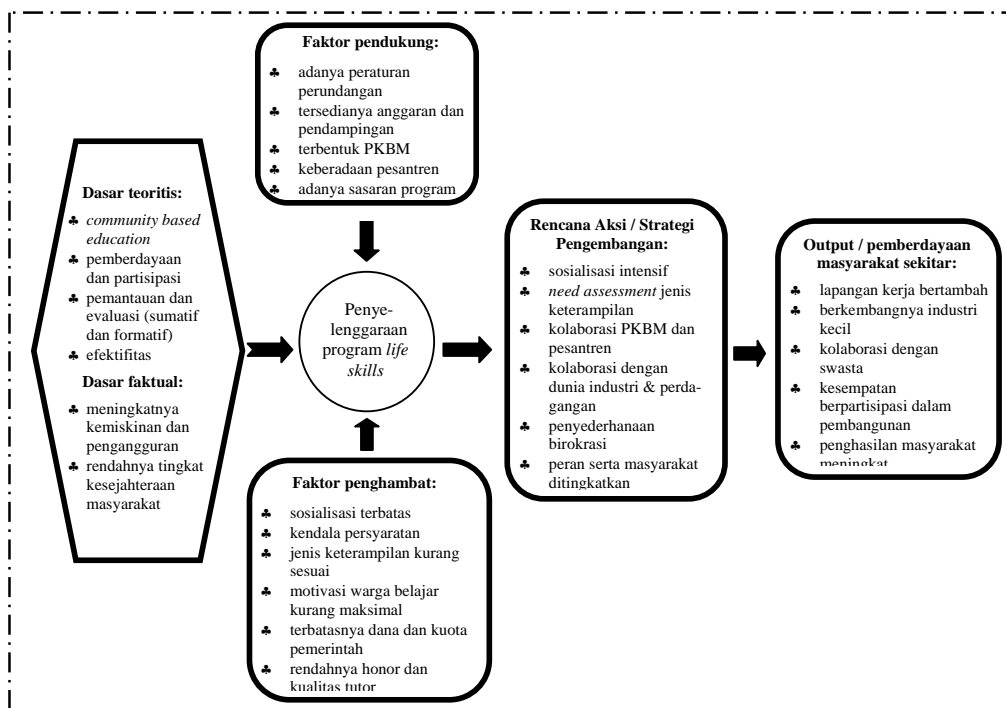
Kesesuaian PKBM dengan pengembangan masyarakat, dapat ditelaah dari pengertian pengembangan masyarakat, yaitu sebagai suatu metode atau pendekatan pembangunan yang menekankan adanya *partisipasi* dan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan, di mana semua usaha *swadaya* masyarakat *diintegrasikan* dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk *menaikkan taraf hidup*, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada *inisiatif* masyarakat sendiri, serta *pelayanan teknis* sehingga proses pembangunan berjalan *efektif* (Nasdian 2008). PKBM dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan partisipasi dan inisiatif masyarakat sendiri, memanfaatkan swadaya masyarakat, berintegrasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam usaha menaikkan pengetahuan dan keterampilan warga belajar dengan pelayanan teknis oleh Penilik PLS dan TLD (Tenaga Lapangan Dikmas) agar pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Menilik dari pengertian tersebut, PKBM dapat dikategorikan sebagai pengembangan masyarakat.

Pesantren

Pesantren adalah suatu asrama tempat santri belajar mengaji (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990). UU Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pesantren merupakan pendidikan yang berbasis pada pendidikan keagamaan yang diselenggarakan kelompok masyarakat yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pesantren *salafi*/tradisional (Mujahidin 2005) yaitu pesantren yang hanya memberikan materi agama kepada para santrinya. Tujuan pokok pesantren ini mencetak kader-kader dai yang akan menyebarkan Islam di tengah masyarakatnya. Pada pesantren ini, seorang santri hanya dididik dengan ilmu-ilmu agama dan tidak diperkenankan mengikuti pendidikan formal. Kalaupun ilmu-ilmu itu diberikan, maka hal itu hanya sebatas pada ilmu yang berhubungan dengan keterampilan hidup.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan literatur yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka kerangka pemikiran kajian ini dapat digambarkan sebagaimana tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan menggunakan strategi studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dengan studi kasus dimungkinkan untuk diperoleh informasi secara

mendalam, sehingga dapat menjelaskan peristiwa/gejala sosial yang terjadi di masa sekarang, atau masih dalam rentang pengalaman/ingatan warga masyarakat yang dikaji (Yin 2002). Jenis kajian ini (Patton 1990 dalam Sitorus dan Agusta 2007) adalah evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif untuk menentukan efektifitas tindakan dan intervensi program *life skills* bagi kesejahteraan masyarakat, serta menilai dan merumuskan cara yang efektif dan kondisi yang kondusif untuk mencapai efektifitas program. Sedangkan evaluasi formatif dilakukan untuk membuat rekomendasi perbaikan program *life skills*.

Lokasi penelitian adalah di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, yakni merupakan lokasi di mana PKBM Al-Wathoniyah menyelenggarakan program *life skills*. Penelitian dilaksanakan pada Oktober s.d. Desember 2008. Beberapa alasan penentuan lokasi penelitian adalah:

- a. telah terdapat PKBM Al-Wathoniyah yang menyelenggarakan program *life skills* yang digulirkan Depdiknas. Jenis keterampilan yang dikembangkan adalah seni ukir/meubel, bobok, jahit-menjahit dan bordir, pembuatan makanan ringan (rengginan), pembuatan roti bolu, dan sablon;
- b. terdapat kolaborasi penyelenggaraan program antara PKBM Al-Wathoniyah dengan pesantren *salafi* Mamba'ul Qur'an yang telah lama ada dan mengakar di Desa Sukosono. Sasaran program meliputi para santri, peserta Kelompok Belajar Paket B dan C yang diselenggarakan di pesantren ini, dan masyarakat sekitar pesantren. Di Kabupaten Jepara, hanya PKBM Al-Wathoniyah yang menyelenggarakan kegiatannya dengan berkolaborasi dengan pesantren, maka hal ini merupakan "kekhasan" penyelenggaraan program;
- c. PKBM Al-Wathoniyah pada 1999 dan 2008 pernah menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah dan PLS eks-Karesidenan Pati, tetapi pada tahun-tahun berikutnya tidak mendapatkan penghargaan serupa. Hal ini menarik untuk dikaji;
- d. Masih terdapat potensi pengembangan program di masa mendatang.

Responden dan Informan

Responden dan informan dipilih dari para pihak yang berkaitan erat dengan program *life skills* dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga penulis berusaha memilih secara cermat dan tepat. Proses pemilihan responden dan informan dilakukan dengan menerapkan teknik bola salju (*snow ball*), yaitu dengan bertanya kepada teman atau kontak pribadi, terlibat bersama masyarakat, atau mendekati organisasi dan instansi terkait. Penentuan responden dan informan adalah yang memenuhi kriteria dan diharapkan representatif atau mewakili. Responden yang diambil meliputi: sebagian warga belajar *life skills*, pengurus PKBM Al-Wathoniyah, tutor atau tutor, kyai pondok pesantren *salafi* Mamba'ul Qur'an, serta Penilik PLS dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedung. Sedangkan informan penelitian ini meliputi: aparat Desa Sukosono, aparat Kecamatan Kedung, aparat Dinas dan Cabang Dinas P dan K, masyarakat dan tokoh masyarakat Sukosono.

Cara Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik (Sugiyono 2007):

1. Observasi, untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan yang sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan memberikan petunjuk yang berkaitan dengan masalah penulisan.
2. Interview, untuk mendapatkan data primer yaitu faktor-faktor yang menjadi potensi dan penghambat pelaksanaan program *life skills* melalui PKBM Al-Wathoniyah.
3. Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD), untuk memahami kemampuan dan kemauan masyarakat berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada untuk merancang program pengembangan masyarakat yang sesuai.
4. Studi Dokumentasi / Sumber Data Sekunder, untuk menelaah dan mencatat data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui instansi terkait.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan: reduksi data untuk memilih, memilah, dan menyederhanakan data; penyajian data sehingga mempermudah dalam analisis masalah; serta penarikan kesimpulan dengan cara menghubungkan program *life skills* dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu mendorong PKBM Al-Wathoniyah menyelenggarakan program lebih baik di masa mendatang berdasarkan peluang-peluang atau potensi-potensi yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Program *Life Skills* yang Diselenggarakan PKBM Al-Wathoniyah

PKBM Al-Wathoniyah didirikan pada tahun 1998, diwarnai dengan pro-kontra karena sebagian masyarakat mengira PKBM merupakan partai politik sebagai imbas dari gerakan reformasi. Setelah diadakan musyawarah, akhirnya masyarakat Sukosono menerima keberadaan PKBM. Sampai dengan saat ini, PKBM telah “meluluskan” warga belajar sebanyak 432 orang dan 2 kali menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah dan PLS Karesidenan Pati. Kerja sama dengan kelembagaan lokal dilaksanakan PKBM dalam penyelenggaraan program-program PLS, misalnya dengan pesantren Mamba’ul Qur’an, kumpulan *musholla*, dan *majlis taklim* dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana, perekrutan warga belajar dan tutor, serta pelaksanaan program. PKBM menyelenggarakan 7 jenis PLS, di antaranya adalah program *life skills*.

PKBM Al-Wathoniyah didirikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, yang dalam proses pembentukannya sesuai dengan konsep *pendidikan berwawasan kemasyarakatan* dan merupakan *community based* karena dibentuk dengan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM). Pendanaan kegiatan bersumber pada APBN, APBD, iuran peserta, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

PKBM Al-Wathoniyah merupakan *collectif action sector*, yang kehadirannya tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah di bidang PLS, ditopang oleh pilar regulatif dan normatif, tetapi masih tergantung kepada pemerintah dalam hal dana, kurikulum, dan manajemen. Sehingga meskipun proses pembentukannya berdasarkan prinsip DOUM dan *pendidikan berwawasan kemasyarakatan*, tetapi ketergantungan ini menjadikan PKBM lemah sebagai suatu sistem dan kontrol terhadap sumber daya dalam lingkup fungsinya, meskipun tetap dapat dikatakan sebagai *rules of representation* karena menjalin kemitraan dengan kelembagaan horizontal yaitu pesantren *salafi* Mamba’ul Qur’an.

Pesantren Mamba’ul Qur’an merupakan lembaga keagamaan yang berakar dalam kehidupan masyarakat Sukosono, memberikan kontribusi yang penting bagi syiar

agama Islam. Kesadaran kyai pengasuh pondok pesantren untuk memberikan bekal ilmu pendidikan kepada santrinya bukan hanya ilmu-ilmu agama saja, tetapi dilengkapi dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan jalan bagi PKBM untuk menyelenggarakan PLS termasuk *life skills* dalam lingkungan pesantren. Hal ini memberikan beberapa keuntungan dan dukungan bagi PKBM dan PLS, sebagai berikut:

- 1) keberadaan PKBM diakui oleh tokoh agama yang sedikit banyak mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat Sukosono. Hal ini memberi imbas yang baik dari unsur masyarakat lain, sehingga PKBM akan leluasa untuk menyelenggarakan program-program PLS. Pada saat awal pembentukan, timbulnya masyarakat yang kontra dapat diredam oleh adanya pengakuan keberadaan PKBM dari pesantren;
- 2) melalui pesantren, PKBM dapat mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat;
- 3) PKBM dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pesantren untuk proses belajar mengajar, karena beberapa penyelenggaraan program dilaksanakan dalam lingkungan pesantren. Sebaliknya, pesantren mendapatkan manfaat dari PKBM berupa pembelajaran yang ditujukan kepada para santri dengan persyaratan yang mudah, juga mendapatkan bantuan berupa peralatan jahit-menjahit dan bordir;
- 4) memudahkan PKBM dalam perekrutan warga belajar, karena sebagian sasaran program adalah santri dan masyarakat sekitarnya.

Rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pesantren Mamba'ul Qur'an bagi PKBM Al-Wathoniyah dapat menjadi kapital sosial yang sangat mendukung keberhasilan program PLS termasuk *life skills*.

Jenis dan jumlah peserta *life skills* yang diselenggarakan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Peserta *Life Skills* yang Diselenggarakan PKBM Al-Wathoniyah

No.	Jenis <i>Life Skills</i>	Peserta				Keterangan
		Santri		Masy.		
		L	P	L	P	
1.	Seni ukir/meubel	-	-	2	3	<ul style="list-style-type: none">• Tidak berlanjut, kendala: bahan baku mahal, harga barang jadi tetap, industri meubel lesu, motivasi berkurang• alat tersimpan
2.	Bobok	-	-	5	-	<ul style="list-style-type: none">• Tidak berlanjut, kendala: pemasaran kurang baik karena kebanyakan pengusaha meubel sudah memiliki alat sendiri, kurang menjalin jaringan, industri meubel lesu, motivasi kurang, peserta ada yang memilih merantau ke Jakarta• alat tersimpan
3.	Jahit-menjahit dan bordir	-	20	-	-	<ul style="list-style-type: none">• sebagai pembelajaran keterampilan bagi santri putri• memenuhi kebutuhan intern pesantren
4.	Pembuatan rengginan	-	-	-	10	<ul style="list-style-type: none">• Berlanjut, prospek bagus• Kendala: belum punya ijin usaha, mengandalkan pembuatan bumbu pada 1 orang, memakai peralatan tradisional, tergantung pd sinar matahari
5.	Pembuatan roti bolu	-	-	10	-	<ul style="list-style-type: none">• Berlanjut sebagai usaha perorangan• Prospek bagus• kendala modal
6.	Usaha sablon	20	5	20	-	<ul style="list-style-type: none">• Berlanjut, prospek bagus• hanya dikembangkan 1 orang• pangsa pasar menengah ke bawah• Kendala: kendala modal, ketekunan dan keuletan tinggi

Mencermati tabel di atas, jenis keterampilan seni ukir/meubel dan bobok tidak berlanjut, antara lain disebabkan faktor eksternal berupa lesunya industri meubel saat ini. Faktor lainnya adalah motivasi warga belajar yang menurun. Sedangkan jenis keterampilan jahit-menjahit dan bordir, pembuatan rengginan, pembuatan roti bolu, serta usaha sablon dapat berlanjut dan memberikan manfaat bagi warga belajarnya.

Berkaitan dengan proses penetapan jenis-jenis *life skills* di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pemilihan jenis keterampilan berawal dari ide yang dicetuskan oleh pengurus PKBM Al-Wathoniyah dan PLS Kecamatan Kedung, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, permintaan pasar, dan kemungkinan pengembangannya termasuk penentuan personil yang akan ditawarkan menjadi koordinator atau tutor;
2. Rumusan ide tersebut dibawa ke dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh PKBM Al-Wathoniyah dengan mengundang tokoh masyarakat, pesantren Mamba'ul Qur'an, serta personil yang dianggap bisa mengembangkan jenis keterampilan *life skills* yang telah dirumuskan;
3. Dalam forum musyawarah tersebut, ditawarkan apakah ide tersebut dapat diterima dan dilaksanakan, atau terdapat usulan lain. PKBM membuka diri untuk mendapatkan masukan, termasuk berapa jumlah modal awal yang diberikan, bagaimana proses penyelenggaraan kegiatan/usaha, dan seterusnya;
4. Penyelenggaraan *life skills* diserahkan kepada para koordinator setelah mendapatkan dana stimulan yang disepakati sebesar Rp 500.000,00 per jenis keterampilan. Lokasi dan waktu penyelenggaraan menyesuaikan situasi dan kondisi tergantung kesepakatan anggota kelompok yang akan terbentuk, yang semuanya tersebar di wilayah Desa Sukosono. Hal ini menguntungkan dari segi sosialisasi program kegiatan bagi seluruh warga, meskipun masih terdapat sebagian warga yang belum mengetahui keberadaan PKBM Al-Wathoniyah;
5. Beberapa kendala ditemukan, antara lain pengawasan, pemantauan, dan pendampingan yang kurang maksimal dari PKBM. Sehingga setelah modal awal diberikan, para koordinator menjalankan kegiatan tersebut sendiri. "Pembiaran" ini menurut pengurus PKBM karena mengingat keterbatasan personil dan dimaksudkan untuk mendorong kemandirian bagi warga belajar untuk mengembangkan diri. *Stakeholder* pengembangan kegiatan belum maksimal, misalnya *stakeholder* pemasaran produk dan kerja sama dengan pihak pengusaha;
6. Pencairan dana *life skills* dilakukan setelah proposal disetujui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, dan diserahkan dalam bentuk *block grant* untuk membiayai semua jenis kegiatan PKBM. Hal ini menandakan bahwa keberlangsungan PKBM masih tergantung dari dana *block grant* yang diberikan Pemerintah, sementara sumber pendanaan yang lain belum tergali.

Analisis Efektifitas Program

Hartrisari (2007) mengungkapkan bahwa efektif merupakan derajat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, misalnya pencapaian jumlah total penjualan dari target suatu perusahaan. Efektif adalah "*doing the right thing*" (melakukan hal yang benar). Program *life skills* cukup efektif dilaksanakan PKBM Al-Wathoniyah, ditinjau dari kelembagaan PKBM sebagai penyelenggara, proses penyelenggaraan program, serta keberhasilan program.

Proses pembentukan PKBM telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Begitu pula dengan pemenuhan syarat minimal pembentukan dan penyelenggaraan bidang-bidang kegiatan yang dikelola. Proses penyelenggaraan program melibatkan beberapa *stakeholders* yang terdapat dalam masyarakat, yaitu unsur pemerintah, penyelenggara dan warga belajar, serta pesantren dan masyarakat sekitarnya. Beberapa program *life skills* cukup berhasil karena dapat memberi manfaat nyata bagi warga belajar, masyarakat, dan pemerintah baik dalam perluasan jaringan maupun peningkatan ekonomi; beberapa program lainnya berhenti dan tidak berlanjut.

Secara umum, program *life skills* memberikan manfaat bagi warga belajar, masyarakat, dan pemerintah baik dalam perluasan jaringan maupun peningkatan ekonomi, yaitu:

1. Manfaat bagi warga belajar

Dari segi peningkatan ekonomi, program *life skills* minimal dapat memberi manfaat untuk:

- a) memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan sebagai bekal untuk berusaha sendiri;
- b) memiliki penghasilan sendiri yang dapat digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya;
- c) memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat ditularkan dari tutor atau nara sumber teknik kepada warga belajar;

Namun, dalam perluasan jaringan, masih diperlukan pengembangan karena selama ini hanya mengandalkan kemampuan alami tanpa didukung oleh tenaga pengajar / tutor / nara sumber teknik yang lebih profesional, jaringan usaha yang lebih luas, dan akses pemasaran yang masih terbatas. Rengginan akan lebih berkembang apabila didukung oleh jaringan pemasaran yang baik di samping regenerasi pembuatnya, begitu pula dengan roti bolu dan sablon dapat lebih berkembang apabila pengelola PKBM dan PLS lebih meningkatkan upaya-upaya pendampingan, tidak hanya diserahkan kepada kemampuan kelompok atau perorangan untuk berkembang sendiri.

2. Manfaat bagi masyarakat Sukosono

- a) dapat menjalankan usaha sehingga terhindar dari menganggur akibat lesunya industri meubel yang selama ini menjadi mata pencaharian utama
- b) dapat menciptakan aneka mata pencaharian baru, yaitu pembuatan rengginan, roti bolu, dan usaha sablon.
- c) dapat meningkatkan penghasilan masyarakat

Dari segi peningkatan penghasilan, program ini telah menyentuh beberapa bagian masyarakat. Tetapi dari segi perluasan jaringan, masih perlu mendapatkan tinjauan. Program seni ukir/meubel dan bobok akan lebih berkembang apabila pemerintah dan para pengusaha meubel di Sukosono dan sekitarnya dapat diberdayakan untuk membantu program, misalnya dari segi pemasaran dan stimulan dana.

3. Manfaat bagi pemerintah

- a) wujud pelaksanaan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan

Upaya pemerintah untuk terus berinovatif mengembangkan PLS, berarti pemerintah telah menjalankan tugasnya. PLS termasuk *life skills* dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, masyarakat lebih produktif sehingga menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Apabila usaha ekonomi masyarakat berkembang dengan baik, maka kemajuan pembangunan baik perdesaan dan perkotaan menjadi lebih baik. Melalui *life skills* yang diselenggarakan oleh PKBM dengan pendampingan anggaran dan teknis dari pemerintah, dari sisi pemerintah hal ini membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam taraf implementasi penyelenggaraan pendidikan, tugas pemerintah tidak berhenti hanya dengan menciptakan suatu program saja, tetapi harus konsekuen memberikan petunjuk pelaksanaan, kurikulum, pendanaan, dan tenaga pendamping yang memadai. Selanjutnya, para pelaku pendidikan juga harus merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa penetapan kebijakan sektor pendidikan ini seyogianya tidak “asal memenuhi kewajiban”, tetapi benar-benar diarahkan bagi kesejahteraan rakyat.

b) mendorong penciptaan lapangan kerja

Untuk penciptaan lapangan kerja ini, pemerintah harus memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tidak “didikte” oleh pemerintah karena dalam hal ini fungsi pemerintah adalah sebagai pendamping.

c) upaya menghindarkan masyarakat dari pengangguran

Penyelenggaraan *life skills* oleh PKBM Al-Wathoniyah tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung tersebut yaitu: (a) terdapatnya peraturan perundangan yang mengatur tentang program ini, (b) terdapatnya anggaran dan pendampingan oleh dinas teknis terkait, (c) telah terbentuknya PKBM Al-Wathoniyah sebagai penyelenggara program, (d) keberadaan pesantren Mamba’ul Qur’an yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Sukosono serta dapat bekerjasama dengan PKBM untuk menyelenggarakan program, dan (e) adanya sasaran program yaitu para santri dan masyarakat sekitar pesantren. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi, antara lain: (1) belum tersosialisasinya program dengan baik, (2) kendala persyaratan yang memberatkan PKBM, (3) jenis keterampilan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan warga belajar, (4) kecenderungan warga belajar yang serba ingin “instant” untuk memperoleh penghasilan sehingga mempengaruhi motivasi, (5) anggaran pemerintah yang “terbatas”, serta (6) rendahnya honor dan kualitas tutor. Faktor-faktor penghambat tersebut dikelompokkan dalam empat permasalahan, yaitu sumber daya manusia, dana, manajemen, dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan beberapa rancangan program aksi meliputi: program peningkatan mutu produk yang dilakukan untuk tetap mempertahankan jenis *life skills* yang bermanfaat dan berlanjut sampai dengan sekarang serta “menghidupkan” jenis keterampilan yang berhenti di tengah jalan; program pengembangan usaha dengan pengembangan jejaring dan peningkatan kerja sama antar *stakeholder*; dan program pembentukan usaha baru untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang memerlukan *life skills*, antara lain penyediaan APE (Alat Peraga Edukatif) dan usaha bordir.

Program Peningkatan Mutu Produk

Hal yang menjadi sebab keberhasilan pengembangan usaha adalah mutu produk. Apabila produk yang dihasilkan mempunyai daya saing (*competitiveness*) yang baik, ditunjang dengan aspek pemasaran yang baik pula, maka produk tersebut akan diterima oleh pasar sehingga dapat menunjang keberhasilan usaha.

Jenis *life skills* yang dikembangkan sebagian telah berjalan dengan baik, tetapi tetap memerlukan usaha-usaha peningkatan mutu produk. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Jenis *life skills* yang masih berjalan perlu diberikan dorongan untuk tetap mempertahankan mutu produknya, sedangkan yang tidak berjalan bila memungkinkan “dihidupkan” kembali dengan strategi yang baru;
- b. Dorongan tersebut misalnya: penambahan modal yang diperoleh melalui pengajuan proposal kepada Dinas P dan K Propinsi maupun Dinas P dan K Kabupaten; penambahan peralatan; pengemasan produk lebih baik; serta perizinan usaha;
- c. menjalin kualitas hubungan antara PKBM, warga belajar, dan dinas teknis sehingga permasalahan terkait dengan mutu produk dapat dipecahkan bersama;
- d. Masing-masing koordinator bertambah motivasi dan semangatnya dalam menjalankan program.

Program Pengembangan Usaha

Jejaring (*networking*) sangat besar peranannya dalam keberlanjutan program. Beberapa jenis usaha yang dilaksanakan sebagai *output* dari *life skills* terhenti di tengah jalan karena jejaring yang terbatas. Demikian pula yang telah berjalan, akan lebih berkembang apabila terdapat jejaring yang luas baik dari sisi *input*, *proses*, maupun *outputnya*.

Seni ukir/meubel dan bobok yang merupakan jenis usaha yang bergerak dalam permeubelan, dipengaruhi oleh pasang-surutnya industri tersebut. Tetapi, tidak semua pengusaha secara drastis mengalami kemunduran, asal tetap mempertahankan jejaring yang baik. Dari sisi *input*, modal tetap menjadi perihai yang penting. Karena itu, perlu dikembangkan usaha pencairan modal misalnya memanfaatkan kredit usaha kecil yang ditawarkan lembaga keuangan semacam bank, atau melalui program Kursus Wirausaha Orientasi Pedesaan (KWD) yang baru ditetapkan Depdiknas pada tahun 2008. Jejaring dengan pengusaha meubel untuk mencari *order* sebagai solusi pemasaran, serta perekrutan peserta baru yang lebih mempunyai motivasi perlu dilaksanakan.

Pembuatan makanan ringan berupa pembuatan roti bolu dan rengginan selama ini telah berjalan baik. Hanya aspek pemasaran yang terbatas perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Permasalahan belum adanya izin usaha, perlunya penambahan modal, dan pengemasan produk yang belum maksimal; bisa dipecahkan bersama antara PKBM, koordinator usaha, dan dinas teknis terkait.

Keterampilan menjahit dan bordir yang selama ini dilaksanakan dalam lingkungan pesantren, agar tetap dipertahankan dengan menekankan pada penyediaan waktu belajar khusus di luar kegiatan mengaji. Perlu dipertimbangkan mengembangkan usaha jahit dan bordir ini bukan hanya dalam lingkungan pesantren, dengan sasaran program warga Sukosono agar dapat lebih banyak menjangkau masyarakat. Program KWD yang baru ditetapkan pemerintah, perlu mendapatkan respon positif dari PKBM.

Berkenaan dengan usaha sablon, selama ini perkembangannya terbatas. Beberapa penyebabnya adalah keterbatasan dana, kualitas produk hanya menjangkau “menengah ke bawah”, keterbatasan peralatan, dan keterbatasan personil. Untuk itu, selain mengembangkan mutu produk agar meningkat ke pangsa pasar “menengah ke atas”, perlu pengembangan jejaring dengan pengusaha percetakan (sablon kertas) yang sudah mapan untuk memperluas pemasaran.

Program Pembentukan Usaha Baru

Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat Sukosono serta masih banyaknya pengangguran, membuka peluang bagi PKBM untuk lebih meningkatkan program *life skills*. Peluang ini bersambut dengan program KWD yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas, yang diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga masyarakat desa sebagai bekal untuk dapat bekerja dan/atau usaha mandiri sesuai dengan potensi/sumber daya lokal (*local genius* dan *lokal resources*) di daerahnya (Depdiknas 2008). Apabila pengajuan proposal kegiatan KWD dapat lolos seleksi, dana yang diperoleh dapat menjadi modal untuk pengembangan usaha yang selama ini telah berjalan, melalui pengelolaan “subsidi silang” sebagaimana sering dilaksanakan oleh PKBM Al-Wathoniyah.

Jenis usaha baru yang perlu dipertimbangkan adalah penyediaan APE (Alat Peraga Edukatif) dan bordir. APE diperlukan untuk alat-alat permainan yang menunjang proses pembelajaran, terutama bagi anak-anak usia dini. Sasaran pemasaran APE adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau *play group*, dan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Kedung. Selama ini, penyediaan APE belum menjadi fokus para pengusaha dan pengrajin meubel di Jepara, masih dibeli dari luar kota (Solo dan Jogja), sehingga memunculkan pasar yang potensial. Potensi yang besar ini dapat dimanfaatkan oleh PKBM, apabila proposal yang diajukan dapat disetujui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Karena itu, pembuatan proposal yang baik perlu disiapkan oleh PKBM dengan didampingi oleh dinas teknis terkait.

Jenis keterampilan *life skills* bordir, selama ini hanya diberikan kepada santri dan tidak diarahkan untuk usaha. Apabila memungkinkan, perlu dibangun usaha bordir dengan bekerja sama dengan warga Sukosono yang menguasai jenis keterampilan bordir dan bersedia menjalankan program. Perekrutan nara sumber teknik yang telah menguasai dengan baik jenis keterampilan tertentu, diharapkan dapat menjadikan program berjalan dengan baik dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program *life skills* merupakan salah satu jenis PLS yang diselenggarakan oleh PKBM Al-Wathoniyah. Penyelenggaraan program bekerja sama dengan pesantren *salafi* Mamba'ul Qur'an dalam bentuk sosialisasi program, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk tempat, perekrutan warga belajar dan tutor.

Secara umum, penyelenggaraan pendidikan luar sekolah termasuk *life skills* yang diselenggarakan PKBM Al-Wathoniyah cukup efektif, karena sebagian besar programnya dirasakan manfaatnya bagi warga belajar, masyarakat, dan pemerintah dalam perluasan jaringan maupun peningkatan ekonomi. Efektifitas PKBM ini ditunjang dengan proses pembentukan yang melibatkan partisipasi warga, pemenuhan syarat minimal pembentukan, pengembangan bidang-bidang kegiatan yang dikelola, serta keberhasilan program yang dijalankan.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program *life skills*. Faktor pendukung meliputi peraturan perundangan, anggaran dan pendampingan, masih *eksis*-nya PKBM Al-Wathoniyah, dukungan pesantren Mamba'ul Qur'an, serta santri dan masyarakat sekitar pesantren sebagai sasaran program. Faktor penghambat dikelompokkan dalam empat permasalahan, yaitu sumber daya manusia, dana, manajemen, dan kebijakan pemerintah.

Beberapa program *life skills* dapat berjalan dan berlanjut sampai dengan sekarang, beberapa berhenti di tengah jalan karena beberapa sebab. Karena itu perlu diadakan intervensi melalui program aksi yang telah dirumuskan berdasarkan FGD, demi perbaikan program *life skills* dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat sekitar pesantren. Rencana program aksi meliputi: program peningkatan mutu produk, program pengembangan usaha, dan program pembentukan usaha baru.

Saran

1. Bagi pemerintah

Depdiknas hendaknya merumuskan konsep kebijakan program *life skills* secara utuh, tidak hanya menitikberatkan pada *vocational skills* semata. Program *life skills* dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah maupun PLS untuk mengubah pola pikir dan perilaku para remaja/pemuda dalam mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Perubahan ini akan dapat mengatasi persoalan remaja saat ini: pencegahan penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, kehamilan di luar nikah, pencegahan HIV/AIDS, dan pencegahan bunuh diri, pemahaman bahaya merokok, dan sebagainya. Pemerintah hendaknya membuat regulasi yang memihak kepada efektifitas program, misalnya birokrasi pengajuan dan pencairan dana, menyetujui proposal yang potensial untuk dikembangkan, serta pemberian petunjuk teknis agar tidak terlambat.

Penyelenggaraan program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik apabila memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Strategi yang dapat diambil adalah melakukan kolaborasi yang efektif dengan kelembagaan masyarakat yang telah ada dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, misalnya kelembagaan pesantren. Strategi ini memungkinkan program pemerintah dapat berjalan optimal, dan masyarakat dapat ikut memiliki dan menerima manfaat secara langsung. Identifikasi dan kolaborasi dengan kelembagaan masyarakat yang tepat akan membawa keberhasilan bagi program yang dijalankan.

Secara operasional, pemerintah yang berkompeten terhadap program ini adalah Dinas P dan K Kabupaten Jepara dan Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedung; agar benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping, pembuat kebijakan operasional kegiatan, pemberi stimulan dana, sekaligus sebagai

pengawas yang memonitor penyelenggaraan program, agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan dirasakan manfaatnya.

2. Bagi penyelenggara program

Penyelenggara program yaitu pengurus PKBM Al-Wathoniyah, tutor, dan pesantren Mamba'ul Qur'an, agar merealisasikan rencana program aksi yang dirumuskan dalam FGD. Pengurus PKBM harus mengupayakan penambahan modal melalui pengajuan proposal kepada pemberi dana stimulan, senantiasa melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap program *life skills*, menjalin kolaborasi dengan pesantren, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya, serta melakukan koordinasi intern organisasi agar program-program PLS yang dikembangkan PKBM dapat efektif. Tutor agar meningkatkan kedisiplinan dalam proses belajar-mengajar serta terus-menerus meningkatkan kemampuan penguasaan materi yang dimilikinya, antara lain dengan membaca buku-buku dan belajar kepada yang lebih menguasai. Pesantren Mamba'ul Qur'an agar tetap memberi dukungan penyelenggaraan program, yaitu dengan tetap mensosialisasikan program, memberi tempat dan waktu belajar-mengajar untuk beberapa jenis *life skills*, serta mendorong para santri untuk mengikuti program dengan baik.

3. Bagi warga belajar

Warga belajar agar tetap mempertahankan motivasi dalam belajar dan berlatih, mengurangi kecenderungan untuk ingin serba “instant” dalam memperoleh penghasilan, serta berupaya menghilangkan ketergantungan modal kepada pemerintah, antara lain dengan benar-benar mengembangkan stimulan modal yang diterima untuk menjalankan usaha. Tanpa motivasi yang kuat, maka warga belajar akan kesulitan menjalankan kegiatan dan tidak menjamin *sustainability* program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Standar Nasional Pendidikan (SNP)*. Bandung: Fokusmedia.
- _____. 2008. *Life Skills*. Didownload dari <http://www.google.com/lifeskills> tanggal 10 Pebruari 2008 pukul 17.37 WIB.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2006. *Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2007*. Jakarta: BPS.
- [Depdagri] Departemen Dalam Negeri. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*.
- [Depdiknas] Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Direktorat Jenderal PLS dan Pemuda Depdiknas.
- _____. 2008. *Pedoman Program Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
- Hartrisari. 2007. *Bahan Ajar Mata Kuliah Analisis Sosial: Konsep Berpikir Sistem dan Permodelan*. Bogor: Departemen KPM Institut Pertanian Bogor (IPB).

- Ife, Jim. 1995. *Community Development (Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice)*. Melbourne Australia: Longman Australia Pty Ltd.
- Joesoef, Soelaiman. 2004. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujahidin, Endin. 2005. *Pesantren Kilat Alternatif Pendidikan Agama di Luar Sekolah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2007. *Tajuk Modul KPM-51B: Sosiologi untuk Pengembangan Masyarakat*. Bogor: Departemen KPM FEMA IPB.
- Sitorus, Felix M.T. dan Ivanovich Agusta. 2007. *Tajuk Modul SEP-527: Metodologi Kajian Komunitas*. Bogor: Departemen KPM FEMA IPB.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wahyudin, Dinn, *et al.* 2008. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus (Desain dan Metode), Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliantoro, Gito. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): Studi Kasus di PKBM "Mitra Mandiri" Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi*. Bogor: Kajian Pengembangan Masyarakat.

Biodata Penulis

Dr.Ir. Pudji Muljono, M.Si; adalah staf pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB Bogor;

Drs. Dian Noor Tamzis Hanafi, MPM; adalah alumnus program pasca sarjana IPB Bogor.